

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang merdeka, tentunya memiliki sebuah cita-cita luhur yang ingin diwujudkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bersama penduduk Indonesia sendiri. salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini juga merupakan salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia ke-4 yang berbunyi: "...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia”.

Mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan sebagai sarana dalam membangun kualitas manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memunculkan semangat dan kesadaran yang tinggi, menciptakan akhlak dan budi pekerti yang luhur, berkepribadian kuat, cerdas dan terampil, serta mampu menjalin hubungan baik antar sesama manusia di tengah tengah lingkungannya.

Hal ini seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pendidikan merupakan investasi yang sangat luar biasa bagi suatu negara. Pendidikan juga merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi. Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas warga negara. Bagaimana tidak, pendidikan merupakan investasi seseorang bagi masa depannya dan merupakan bagian dari penentu kesuksesan seseorang.

Kemerdekaan membuat rakyat berlomba-lomba dalam menempuh pendidikan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Sekolah (APS) mayoritas setiap Provinsi di Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2017 sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, misalnya di Provinsi Jawa Timur untuk kelompok usia 7-12 tahun pada tahun 2011 mencapai 98,27% dan tahun 2017 mencapai 99,57%. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sadar akan pentingnya pendidikan.

Sadarnya masyarakat tentang pentingnya pendidikan namun tidak didukung dalam peningkatan mutu pendidikan seperti rendahnya kualitas pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Salah satu contoh dalam pendidikan formal yaitu adanya pengajaran yang di gunakan lebih banyak menggunakan jaringan internet dari pada buku. Terutama bagi para siswa yang saat ini lebih memilih mengakses segala informasi melalui teknologi digital dibandingkan datang langsung ke perpustakaan. Padahal sumber bacaan yang didapat dari internet belum tentu terjamin kualitas maupun kebenarannya. Hal seperti ini membuat anak tidak memiliki budaya membaca buku. Masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi, seperti yang diketahui oleh peneliti sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil penelitian perpustakaan nasional tahun 2017, rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 3-4 kali per minggu, dengan durasi waktu membaca per hari rata-rata 30-59 menit. Sedangkan, jumlah buku yang ditamatkan per tahun rata-rata hanya 5-9 buku.” (sumber:www.kompas.com, diakses 27 Oktober 2018).

Masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Indikator Sosial Budaya pada tahun 2015. Masyarakat lebih memilih menonton televisi (91,47%), mendengarkan radio (7,54%) dan membaca koran (13,11%). Masalah rendahnya minat baca juga dialami di Kota Surabaya, seperti yang diketahui oleh peneliti berdasarkan penelitian Baperpus Surabaya sebagai berikut:

“Berdasarkan penelitian Baperpus Surabaya pada tahun 2011, hanya 42 persen warga Surabaya yang memiliki minat baca. Pemkot kemudian

meneliti lagi minat baca warga Surabaya pada 2015. Penelitian dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Hasil penelitian yang diterbitkan pada Desember 2015 itu menunjukkan bahwa minat baca warga Surabaya melonjak menjadi 60 persen dari total penduduk Kota Pahlawan.” (sumber:www.jawapos.com, diakses 27 Oktober 2018).

Ini dikarenakan pemerintah Kota Surabaya telah memiliki 1.430 titik layanan literasi terdiri dari perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar merata di beberapa kawasan. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan dalam Millenium Development Goals (MDGs) Award pada tahun 2013 yakni kategori pendidikan dengan bidang pengembangan layanan perpustakaan umum.

Seperti yang dijelaskan di atas, Surabaya mempunyai 1430 titik lokasi yang berada di taman, balai RW, rumah sakit, sekolah, instansi, rumah susun, terminal, dan bahkan ada di lingkungan pondok sosial (liponsos). Hal ini disebabkan karena adanya Perda no 5 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan pasal 7 ayat (2) yang berisi: “Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain meliputi: tempat pelayanan kesehatan; tempat penyelenggaraan pendidikan; tempat ibadah; tempat kerja/perkantoran; pusat perbelanjaan; rusun/apartemen/hotel; tempat rekreasi dan hiburan umum”.

Meskipun Surabaya memiliki beberapa Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di berbagai fasilitas umum, namun kenyataannya tidak

semua fasilitas umum tersedia TBM. Seperti pernyataan mantan Kepala Baperpus Surabaya Arini Pakistyaningsih yang menjelaskan:

“TBM tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Namun, jumlah di setiap kecamatan berbeda. Kecamatan Sawahan memiliki TBM terbanyak. Yakni, 49 TBM. Kecamatan dengan jumlah TBM paling sedikit adalah Pabean Cantian. Jumlahnya hanya lima TBM.” (sumber:www.jawapos.com, diakses 27 Oktober 2018).

Berdasarkan berita diatas maka dapat diketahui bahwa tidak semua Balai RW yang berada di setiap wilayah Kecamatan sudah tersedia TBM, padahal Balai RW merupakan salah satu sasaran dalam Perda Kota Surabaya No 5 tahun 2009. Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya pada bulan November 2018 terdapat sekitar 670 TBM di Kota Surabaya.

Surabaya Akseliterasi sudah menjadi *concern* Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beberapa tahun ini. Berbagai kegiatan dimatangkan untuk mempercepat budaya literasi masyarakat Surabaya. Kegiatan tersebut dilakukan serentak di 31 titik Kecamatan. Berikut pernyataan mantan Kepala Baperpus Surabaya Arini Pakistyaningsih yang menjelaskan:

“Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan (Baperpus) Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih, mengatakan program Surabaya Akseliterasi ini meliputi empat kegiatan. Yakni, lomba kampung literasi, lomba orang tua peduli pendidikan anak, lomba pustakawan berprestasi, dan fasilitator literasi. Arini menjelaskan, untuk kampung literasi, akan dilihat kampung mana yang memiliki tempat belajar yang menyenangkan dan memfasilitasi anak-anak untuk belajar.” (sumber:www.jatim.metrotvnews.com, diakses 27 Oktober 2018).

Kecamatan Jambangan juga ikut berpartisipasi, salah satu peserta yaitu TBM RW 5 Kelurahan Jambangan yang berhasil mendapatkan penghargaan

di bidang kampung literasi. Seperti yang diketahui oleh peneliti sebagai berikut:

“bahwa kepedulian warga RW 5 Kelurahan Jambangan tak hanya berfokus pada tanaman yang hijau. Namun, mereka juga menyiapkan tempat membaca yang nyaman untuk masyarakat. Ini tampak dari Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di balai RW. Hampir tiap hari, TBM ini tak pernah sepi dari pembaca yang mayoritas anak muda. Ratusan buku bacaan terdiri dari berbagai jenis. Diantaranya, buku pelajaran, novel, hingga pengetahuan umum, yang berasal dari berbagai pihak. Sehingga tak mengherankan dengan banyaknya terobosan yang dilakukan, RW ini mendapatkan penghargaan di bidang literasi mulai lingkup kecamatan hingga Surabaya”. (sumber:surya.co.id, diakses 27 oktober 2018).

Dari sini penulis tertarik untuk meneliti “Implementasi Program Taman Bacaan Masyarakat RW 5 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah “Bagaimana Implementasi Program Taman Bacaan Masyarakat RW 5 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Taman Bacaan Masyarakat RW 5 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan menggunakan teori implemetasi Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari beberapa variabel yaitu ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi,

kecenderungan badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Implementasi Program Taman Bacaan Masyarakat RW 5 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada program ilmu administrasi negara FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang terjadi dan juga untuk membantu pemahaman lebih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya sebagai tambahan masukan dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Layanan Taman Bacaan Masyarakat di Balai RW 5 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi dan literatur pada perpustakaan yang digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UPN “Veteran” Jawa Timur.